

Kepada
Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Yogyakarta
Jl. Kapas No. 9
YOGYAKARTA - 55166

Perihal: Lomba Karya Tulis Ilmiah Antar Perguruan Tinggi BI-CKC 2015

Sebagai bagian dari peningkatan kerjasama antara Bank Indonesia dan Kalangan Perguruan Tinggi, seperti halnya tahun lalu, Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Antar Perguruan Tinggi BI-CKC 2015 (Bank Indonesia-Campus Knowledge Competition). Lomba ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemitraan strategis antara Bank Indonesia dan Perguruan Tinggi, dalam hal monitoring kebijakan yang dihasilkan oleh Bank Indonesia.

Lomba BI-CKC 2015 direncanakan akan dilaksanakan pada **2 Maret s.d. 30 Juni 2015**, dengan tema penulisan lomba **"Inovasi dan Implementasi Sistem Pembayaran Yang Efektif dan Efisien Untuk Mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)"**. Peserta Lomba BI-CKC 2015 adalah masyarakat umum dan/atau Dosen dan/atau Mahasiswa (dapat perseorangan atau kelompok) di Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Adapun keterangan lengkap mengenai persyaratan lomba dapat dilihat di Term of Reference (TOR) terlampir. TOR ini juga dapat diperoleh dengan mudah di website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>). Untuk menunjang publikasi lomba, maka bersama surat ini juga kami sertakan 5 (lima) buah poster untuk dapat diumumkan di Perguruan Tinggi Saudara.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini, mohon kiranya dapat diinformasikan di lingkungan Perguruan Tinggi Saudara. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

PUSAT RISET DAN EDUKASI BANK SENTRAL
Kepala Grup



Wahyu Dewati
Direktur

Informasi Tambahan Persyaratan Karya Tulis

Oleh karena luasnya Tema Penulisan pada poin 4.1, pada TOR, agar penulisan lebih terfokus, maka setiap karya tulis yang mengikuti lomba ini wajib memuat 4 (empat) aspek berikut:

1. Aspek keamanan dan kenyamanan pembayaran non-tunai
Tinjauan mengenai pembayaran non-tunai dalam hal kepraktisan, efisiensi, keamanan transaksi (*security*), mudahnya pelacakan dan sebagainya.
2. Aspek infrastruktur (teknologi) sistem pembayaran yang memudahkan pembayaran non-tunai dan mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT)
Dengan perkembangan teknologi pembayaran yang semakin inovatif, infrastruktur yang aman dan handal diperlukan dalam system pembayaran untuk mendukung fitur dan layanan perbankan yang beragam, serta mendukung efisiensi.
3. Regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan e-commerce
Pada prinsipnya, peraturan perihal e-commerce harus mengedepankan kepentingan konsumen Indonesia. Aturan ini sejatinya ditujukan untuk melindungi pihak yang terlibat dalam e-commerce yaitu antara lain penjual (*merchant*), pembeli, dan penyelenggara perdagangan secara elektronik (PPSE) termasuk penyelenggara jasa & sistem aplikasi pembayaran (*service provider*). Para pelaku perdagangan secara elektronik (e-commerce) umumnya telah diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, seperti kewajiban mendaftarkan dan/atau melaporkan usaha. Khusus bagi penyelenggara jasa & sistem aplikasi pembayaran, BI sebagai otoritas sistem pembayaran perlu mengatur lebih lanjut standar operasional dan karakteristik pengamanan untuk melindungi para pelaku yang terlibat, serta mendukung pengembangan e-commerce.
4. Aspek insentif bagi pengguna pembayaran non tunai
Dengan alasan kepraktisan, masyarakat masih memilih memakai uang tunai dalam transaksinya. Oleh karena itu guna mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) perlu ada insentif bagi masyarakat yang biasa menggunakan uang tunai dalam bertransaksi agar mau menggunakan alat pembayaran non tunai. Insentif tersebut bisa saja mengakibatkan perubahan aturan di bidang-bidang di luar sistem pembayaran.